


**PENDAYAGUNAAN DOKTER DAN DOKTER GIGI
WARGA NEGARA ASING (WNA)
DAN
ASAS PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN**
(Penelitian Hukum Normatif Terhadap UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik
Kedokteran dan PERMENKES No. 317/MENKES/PER/III/2010 Tentang
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA) di Indonesia)

TESIS
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh
Bambang Hudiworo Kusuma Dewa
NIM 09.93.0086

	PERPUSTAKAAN
NO. INV : 263 / s2 / MHK / C.1	
TGL : 18 Januari 2013	
REKAM : <i>Qu.</i>	

Kepada
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2012

TESIS

PENDAYAGUNAAN DOKTER DAN DOKTER GIGI WARGA NEGARA ASING (WNA) DAN ASAS PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN
(Penelitian Hukum Normatif Terhadap UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan PERMENKES No. 317/MENKES/PER/III/2010 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA) di Indonesia)

Diajukan Oleh :
Bambang Hudiworo Kusuma Dewa
NIM 09.93.0086

Telah disetujui oleh :

Rembimbing Utama

Prof. Dr. A. Widanti S. SH., CN.

Tanggal...24 Juni 2012



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : **BAMBANG HUDIWORO**

Nim : **09.93.0086**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 7 Juli 2012

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. PROF. DR. AGNES WIDANTI, SH., CN

2. DR. dr. TRI WAHYU MURNI S., SpB-TKV., MH Kes

3. DR. dr. AGUS II. RAHIM., SpOT-Spine., M.Epid., FICs., MH Kes

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada tanggal : 7 Juli 2012

(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN.)
**Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul :

"PENDAYAGUNAAN DOKTER DAN DOKTER GIGI WARGA NEGARA ASING (WNA) DAN ASAS PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN"

Tesis ini disusun guna menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di UNIKA Soegijapranata, Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segenap kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, Msc., sebagai Rektor UNIKA Soegijapranata yang telah menyelenggarakan Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan.
2. Dr. Ir. Rudyanto Soesilo, MSA., selaku Direktur Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum UNIKA Soegijapranata.
3. Prof. Dr. Agnes Widanti S., SH., CN., sebagai Ketua Program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, koreksi, maupun kritik kepada penulis.

4. Prof. Dr. Willa Chandrawila Supriadi, SH., CN., sebagai koordinator Pengola Akademik di Bandung.
5. Dr, dr. Tri Wahyu Murni, SpB-TKV., MH.Kes dan Dr.dr. Agus H Rahim, MEpid, SpOT, Spine, FICS, MHKes sebagai Dosen penguji.
6. Seluruh staf dosen dan asisten pengajar, staf karyawan Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata.
7. Ayah dan ibu, atas segala kasih sayang, perhatian, bantuan material, semangat, serta doa yang senantiasa mengiringi penulis setiap hari, dea adik tersayangku dan seluruh keluarga besar, atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan Angkatan VII, VIII, dan IX kelas Bandung yang selalu memberi semangat dan dorongan hingga akhir penyusunan Tesis ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin. Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat bagi diri penulis dan para pembaca.

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Tesis.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Lampiran.....	ix
Daftar Singkatan.....	x
Halaman Pernyataan.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang.....	1
II. Perumusan Masalah.....	9
III. Tujuan Penelitian.....	9
IV. Manfaat Penelitian.....	10
V. Metode Penelitian.....	11
A. Spesifikasi Penelitian.....	11
B. Metode Pendekatan.....	12
VI. Teknik Pengumpulan Data.....	12
A. Jenis Data.....	12
B. Metode Pengumpulan.....	14

C. Metode Analisis Data.....	14
VII. Penyajian Tesis.....	15

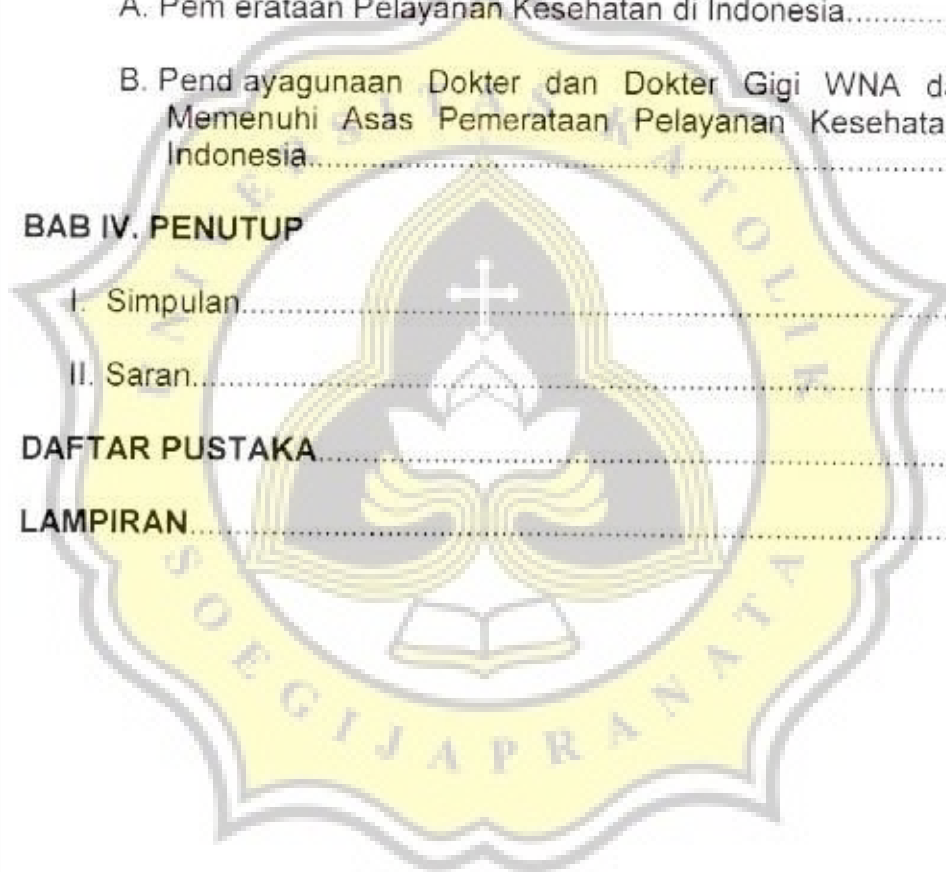
BAB II Tinjauan Pustaka

I. Pendayagunaan Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing (WNA).....	17
A. Pengertian Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing (WNA).....	17
B. Hak dan Kewajiban Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing (WNA) Serta Kewajiban Fasilitas Pelayanan yang Menggunakan Jasa Dokter dan Dokter Gigi WNA.....	22
C. Pendayagunaan Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing (WNA) Berdasarkan PERMENKES Nomor 317/MENKES/PER/III/2010 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA) di Indonesia.....	28
II. Asas Pemerataan Pelayanan Kesehatan di Indonesia.....	38
A. Latar Belakang.....	38
B. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum.....	45
1. Teori Keadilan Aristoteles.....	45
2. Keadilan Sosial ala John Rawls.....	48
C. Landasan Filosofis asas Pemerataan Pelayanan Kesehatan Di Indonesia Sebagai Konsepsi Keadilan.....	50
D. Hakikat dan Karakteristik Asas Pemerataan Pelayanan Kesehatan di Indonesia.....	52
1. <i>The Right to Health Care</i>	53
2. <i>The Right to Information and The Right Self Determination</i>	54

BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

I. Pendayagunaan Dokter dan Dokter Gigi WNA dalam Bidang Kesehatan di Indonesia.....	56
A. Kebijakan Pendayagunaan Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing (WNA).....	56
B. Pendayagunaan Dokter dan Dokter gigi Warga Negara	

Asing Dalam Rangka Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pelayanan di Wilayah Republik Indonesia.....	60
C. Pendayagunaan Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing yang Akan Memberikan Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia.....	67
D. Pembinaan dan Pengawasan Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing di Indonesia.....	73
II. Pendayagunaan Dokter dan Dokter Gigi WNA dan Asas Pemerataan Pelayanan Kesehatan.....	78
A. Pem erataan Pelayanan Kesehatan di Indonesia.....	78
B. Pend ayagunaan Dokter dan Dokter Gigi WNA dalam Memenuhi Asas Pemerataan Pelayanan Kesehatan di Indonesia.....	83
BAB IV. PENUTUP	
I. Simpulan.....	87
II. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	92



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Keterangan	Halaman
	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 317/MENKES/PER/III/2010 Tentang Pəndayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA) di Indonesia	92



DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	KEPANJANGAN
DTPK	: Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan Terluar
DBK	: Daerah Bermasalah Kesehatan
IMTA	: Izin Menggunakan Tenaga Asing
KKI	: Konsil Keokteran Indonesia
MDGs	: <i>Millenium Development Goal's</i>
MTKI	: Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia
PB IDI	: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia
PB PDGI	: Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia
PMA	: Pemilik Modal Asing
RPTKA	: Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
SDM	: Sumber Daya Manusia
STR	: Surat Tanda Registrasi
TKKI	: Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia
TK-WNA	: Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia



PERNYATAAN

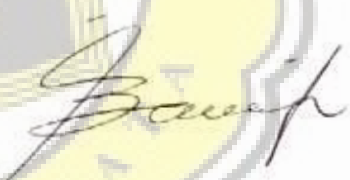
Yang bertanda tangan di bawah ini Saya, Bambang Hudiworo Kusuma Dewa, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 09.93.0086,

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Juni 2012


Bambang Hudiworo Kusuma Dewa

ABSTRAK

Dokter dan dokter gigi Warga Negara Asing (WNA) merupakan salah satu dampak dari munculnya globalisasi kesehatan dalam hal *health provider*. Globalisasi kesehatan muncul dengan adanya *Asean Free Trade Area (AFTA)*, *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, dan *General Agreement on Tariff and Trade/ World Trade Organization (GATT/WTO)*, dimana Indonesia sebagai salah satu anggota telah sepakat dan menyetujui bahwa pasar bebas khususnya untuk sektor perdagangan barang (*goods*) dan jasa (*services*) di kawasan negara-negara ASEAN sudah dimulai pada tahun 2003, sedangkan di kawasan Asia Pasifik akan diberlakukan mulai tahun 2010, dan selanjutnya kawasan dunia pada tahun 2020. Kondisi tersebut memberikan pengaruh terhadap Indonesia dalam mempersiapkan diri memasuki tahap liberalisasi pasar tenaga kerja kesehatan khususnya dokter dan dokter gigi serta tantangan dalam meningkatkan pembangunan kesehatan yang adil dan merata bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI).

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pendayagunaan dokter dan dokter gigi WNA dalam bidang pelayanan kesehatan di Indonesia serta pemenuhan asas pemerataan pelayanan kesehatan dengan diberlakukannya ketentuan tentang tenaga Medis dokter dan dokter gigi WNA.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dan metode analisis yang digunakan adalah kualitatif normatif.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditemukan: (1) Pendayagunaan dokter dan dokter gigi WNA dalam bidang pelayanan kesehatan di Indonesia adalah sebagai pemberi pelatihan dalam rangka alih teknologi dan ilmu pengetahuan serta pemberi pelayanan; (2) Kebijakan mengenai pendayagunaan dokter dan dokter gigi WNA di Indonesia kurang memenuhi dalam hal asas pemerataan pelayanan kesehatan karena batasan wewenang bidang pekerjaan dan sistem *selective policy* dan *one gate policy* dalam pengaturan penggunaan dokter dan dokter gigi WNA.

Saran yang dapat diberikan adalah (1) MKKI segera menetapkan penetapan standar kompetensi untuk jabatan pada masing-masing sektor sebagai dasar pelaksanaan pengendalian penggunaan tenaga dokter dan dokter gigi WNA di Indonesia; (2) Pemerintah perlu membuat kebijakan khusus mengenai pendistribusian TK-WNA khususnya dokter dan dokter gigi WNA ke seluruh wilayah Indonesia agar tercapai pemerataan dalam hal penyediaan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia; (3) Bagi Pemerintah pusat perlu ada kejelasan wewenang bagi pemerintah daerah dalam hal desentralisasi kesehatan yang terkait dengan pemohon tenaga dokter dan dokter gigi WNA sebagai alih ketrampilan dan teknologi dan pemberi pelayanan; (4) Bagi pemerintah dan DPR perlu mengkaji ulang mengenai ketentuan pembatasan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan pengguna dokter dan dokter gigi WNA untuk memenuhi pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia; dan (5) Bagi Pemerintah dan DPR perlu mengkaji ulang mengenai Keputusan KKI Nomor 37/KKI/KEP/IX/2007 mengenai ketentuan permohonan persetujuan dan pelaporan kegiatan oleh dokter dan dokter gigi WNA didasarkan dengan PERMENKES Nomor 317/MENKES/PER/III/2010 pasal 16 ayat (2) dan pasal 24 ayat (1).

Kata kunci : Pendayagunaan Dokter dan dokter gigi WNA, globalisasi kesehatan, asas pemerataan pelayanan kesehatan

ABSTRACT

Doctors and dentists foreigner are one of the impacts health globalization in terms of health providers. Health Globalization comes up due to the Asean Free Trade Area (AFTA), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), and the General Agreement on Tariff and Trade / World Trade Organization (GATT / WTO), in which Indonesia as one of the members agreed for the free trade of goods and services in the ASEAN countries have been started in 2003, while in the Asia Pacific region takes effect in the beginning of 2010, and subsequently the world in 2020. These conditions give effect to Indonesia in preparation for entering the stage of the liberalization of labor markets, especially medical doctors and dentists, as well as challenges in improving the development of fair and equitable health care for every Indonesian citizens (WNI).

Issues raised in this study is the utilization of doctors and dentists foreigner in Indonesia health services, and the fulfillment of the principle of equitable distribution of health services with the enactment of the provision of medical doctors and dentists foreigner in facility health public service.

The approach method used is *yuridis normative*, and analytical method used is *qualitative normative*.

Based on the discussion of research results can be found: (1) Utilization of doctors and dentists foreigners in Indonesia's health services is as trainers in order to transfer technology and science as well as service providers; (2) Policy regarding the utilization of doctors and dentists foreigners in Indonesia does not meet the terms of the principle of equitable distribution of health services due to authority restrictions conducted by the Indonesian government and selective policy system and one gate policy in the regulation of doctors and dentists foreigners.

Advice can be given is (1) MKKI immediately set the standard-setting competence for the job in each sector as the basis for the implementation of controls over the use of doctors and dentists foreigners in Indonesia; (2) the Government needs to make specific policy regarding the distribution of doctors and dentist foreigners in Indonesia in order to achieve equity in the provision of health personnel in Indonesia; (3) for the central government needs to have clear authority to local governments in terms of decentralization of health associated with the applicant's doctors and dentists foreigners as the transfer of skills and technology and service providers; (4) for the government and parliament need to review the rules concerning restrictions on the requirements of users of health care facilities doctors and dentists foreigners to meet the equity of health services in Indonesia, and (5) for the Government and Parliament need to review the decision KKI 37/KKI/KEP/IX/2007 number of provisions for approval and reporting activities by doctors and dentists foreigners based in PERMENKES Number 317/MENKES/PER/III/2010 clause 16 subsection (2) and clause 24 subsection (1).

Keywords: Empowerment of doctors and dentists foreigner, health globalization, the principle of equitable health services